



BPP
DIPPTSP
BUDIDOM
DUPP
DULKE'S
DUNAKSTR. AND

BLOK B
SAT PEMER

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR


Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis merupakan sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029, serta sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Renstra pada masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Serang.

Serang, Desember 2025
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Serang


Surtaman, S.STP, M.Si.
NIP. 19830703 200212 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1. Tugas, Fungsi dan struktur Perangkat Daerah	9
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	26
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	26
2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah	32
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	38
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD 2025-2029	43
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	47
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah	71
BAB V PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Status dan Jenis Kelamin	16
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.....	16
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	17
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	17
Tabel 2.5	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor.....	18
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang.....	22
Tabel 2.7	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
Tabel 2.8	Permasalahan dan Solusi.....	33
Tabel 2.9	Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	34
Tabel 3.1	Tujuan dan Rumusan Renstra PD.....	41
Tabel 3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD 2025-2029.....	43
Tabel 3.4	Penahapan Renstra PD 2025-2029	46
Tabel 4.1	Perumusan Program / kegiatan /Sub Kegiatan Renstra PD.....	48
Tabel 4.2	Rencana Program/kegiatan/Sub Kegiatan dan pendanaan Renstra PD.....	60
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pengembangan Daerah.....	69
Tabel 4.4	Penetapan Indikator Kinerja Utama DISKOMINFO 2025–2029.....	71
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci DISKOMINFO 2025–2029	72

DAFTAR GAMBAR

1.1	Keterkaitan Renstra dengan RPJMD	4
2.1	Struktur Organisasi DISKOMINFO	15
2.2	Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan	23
2.3	Indek Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	23
2.4	Indek Kematangan Penerapan SPBE	24
2.5	Indek Keamanan Informasi	24
2.6	Cakupan Data Statistik Sektorial Yang di Publikasikan	25
2.7	Indeks Kepuasan Masyarakat	25



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perencanaan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, Perangkat Daerah juga diberikan amanat untuk menyusun penjabaran Rencana Strategis (Renstra) dalam format jangka menengah (5 tahun).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk:

- a. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder pembangunan dan masyarakat.
- c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten.

Renstra PD disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.



Sejalan dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang periode tahun 2025-2029 maka akan dilakukan penyusunan RPJMD sesuai dengan visi dan misinya. Bersamaan dengan itu, Perangkat Daerah juga harus memulai melakukan proses penyusunan Rencana Staregis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) untuk periode tahun 2025-2029, dengan memperhatikan penjabaran visi dan misi serta tupoksi tiap perangkat daerah.

Proses penyusunan Renstra PD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pada era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta statistik dan persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih cepat dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang dapat meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan bagi jajaran pemerintahan dapat terwujudnya *e-government* secara utuh yang menjadi tujuan dan pedoman dalam menjalankan suatu program/ kegiatan.

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat maka kebutuhan masyarakat akan IT semakin meningkat. Keinginan untuk serba terbuka,



transparan dan akuntabel menjadi sebuah trend yang harus disikapi secara positif oleh pemerintah. Disisi pemerintah sendiri, suatu perubahan terjadi disaat mulai dicanangkannya sistem desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah menjadi hal yang serius dihadapi setiap pemerintah daerah, sebagai akses dari paradigma baru yang berkembang. Paradigma tersebut disikapi oleh pemerintah pusat dengan memberikan kebebasan penuh kepada setiap daerah untuk mengurus dirinya sendiri dengan lebih memperhatikan kebutuhan lokal yang tidak lagi disamaratakan secara nasional.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kabupaten Serang untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah. Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.

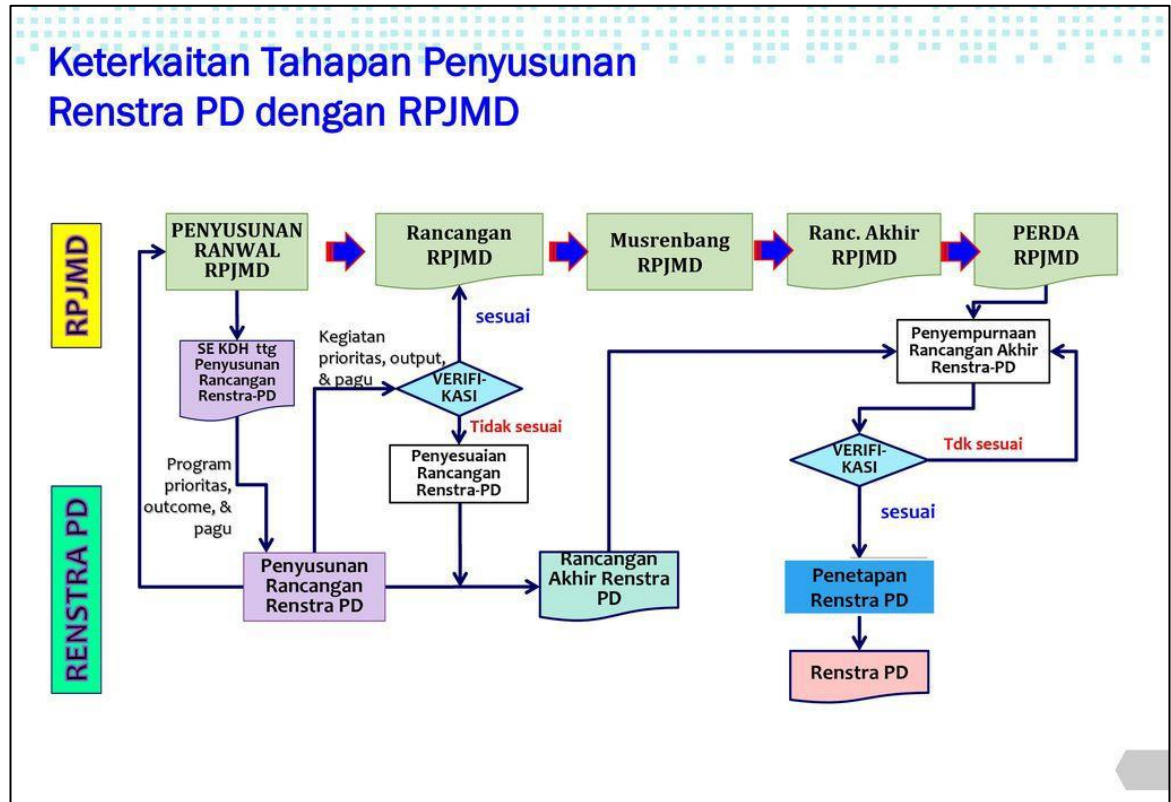
Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi sangatlah penting. Pemerintah Daerah khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kegiatan pembangunan ini tidak semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah, melainkan juga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Sebagai langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serang dengan melalui visinya ***“TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG BAHAGIA”***.

Atas dasar itulah Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang berupaya memberikan pelayanan Informasi yang seimbang kepada masyarakat maupun instansi/lembaga - lembaga lain melalui berbagai kegiatan hariannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Gambaran Keterkaitan mengenai dokumen Renstra dengann RPJMD dapat dijelaskan dalam bagan berikut :

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra dengan RPJMD



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang melatar belakangi maupun yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



7. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE);
15. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1- Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021



- Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Transformasi Digital Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029;
 31. Peraturan Bupati Serang Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Forum Satu Data;
 32. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 33. Peraturan Bupati Serang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang;



34. Peraturan Bupati Serang Nomor 300 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik;
35. Peraturan Bupati Serang Nomor 321 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat;
36. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah kabupaten serang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan /yang sangat strategis di OPD.

Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten serang Tahun 2025-2029. Sedangkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang yang baru berdiri tahun 2019 melalui Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang, menetapkan Rencana Strategisnya Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan Renstra OPD 5 tahun, mulai tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/ kegiatan/sub-kegiatan selama 5 tahun oleh OPD.
2. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil Langkah - langkah / kebijakan tugas -tugas sesuai dengan kewenangannya.
3. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 5 tahun yang akan datang.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA

Sistematika penulisan Renstra OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Serang sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang Latar Belakang secara ringkas yang mencakup pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan tentang rumusan tujuan Renstra, sasaran Jangka menengah perangkat Daerah, Strategi Perangkat Daerah, Arah Kebijakan perangkat Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui IKU Perangkat Daerah, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui IKD.

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi.
- c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- d. Bidang Aplikasi dan Teknologi Informatika;
- e. Bidang Persandian dan Data Statistik;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informasi publik, aplikasi dan teknologi informatika, persandian dan data statistik. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :



- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi publik, aplikasi dan teknologi informatika, persandian dan data statistik;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang komunikasi dan informasi publik, aplikasi dan teknologi informatika, persandian dan data statistik;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informasi publik, aplikasi dan teknologi informatika, persandian dan data statistik; dan
- d. Pelaksanaan tugas tambahan.

Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah bidang umum dan kepegawaian, keuangan, program dan evaluasi. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasional tugas Pemerintahan Daerah di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, program dan evaluasi;
- b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, program dan evaluasi;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, program dan evaluasi;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, program dan evaluasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan urusan umum dan kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasional keumuman dan kepegawaian;



- b. Pengaturan penyelenggaraan keumuman dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan keumuman dan kepegawaian;
- d. Pengawasan penyelenggaraan keumuman dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi

Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, program dan evaluasi. Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, program dan evaluasi;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, program dan evaluasi;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, program dan evaluasi;
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, program dan evaluasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah bidang diseminasi informasi, pelayanan informasi publik dan Pengelolaan media elektronik dan media sosial pemerintah. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang diseminasi informasi, pelayanan informasi publik dan Pengelolaan media elektronik dan media sosial pemerintah;
- b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang diseminasi informasi, pelayanan informasi publik dan Pengelolaan media elektronik dan media sosial pemerintah;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang



- diseminasi informasi, pelayanan informasi publik dan pengelolaan media elektronik dan media sosial pemerintah;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang diseminasi informasi, pelayanan informasi publik dan pengelolaan media elektronik dan media sosial pemerintah; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pelaksanaan urusan diseminasi informasi, pelayanan informasi publik dan Pengelolaan media elektronik dan media sosial pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

Bidang Aplikasi dan Teknologi Informatika

Bidang Aplikasi dan Teknologi Informatika mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah bidang pengembangan aplikasi layanan pemerintah, infrastruktur teknologi informasi komunikasi dan tata kelola teknologi informasi dan SPBE. Bidang Aplikasi dan Teknologi Informatika (Aptika) dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah bidang pengembangan aplikasi pemerintah, infrastruktur teknologi informasi komunikasi, dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi SPBE;
- b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah bidang pengembangan aplikasi pemerintah, infrastruktur teknologi informasi komunikasi, dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi SPBE;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah bidang pengembangan aplikasi pemerintah, infrastruktur teknologi informasi komunikasi, dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi SPBE;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah bidang pengembangan aplikasi pemerintah, infrastruktur teknologi informasi komunikasi, dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi SPBE; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.



Pelaksanaan urusan pengembangan aplikasi pemerintah, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi SPBE pada Bidang Aplikasi dan Teknologi Informatika (Aptika) dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

Bidang Persandian dan Data Statistik

Bidang Persandian dan Data Statistik mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data dan informasi elektronik, dan Pengelolaan statistik sektoral. Bidang Persandian dan Data Statistik dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data dan informasi elektronik, dan pengelolaan statistik sektoral;
- b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data dan informasi elektronik, dan Pengelolaan statistik sektoral;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data dan informasi elektronik, dan pengelolaan statistik sektoral; dan;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang persandian dan keamanan informasi, Pengelolaan data dan informasi elektronik, dan Pengelolaan statistik sektoral; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pelaksanaan urusan persandian dan keamanan informasi, Pengelolaan data dan informasi elektronik, dan pengelolaan statistik sektoral dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf



f, terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional murni/inpasing dan Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas pokok wajib:

- a. Menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpifikasi di dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis; dan
- b. Melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

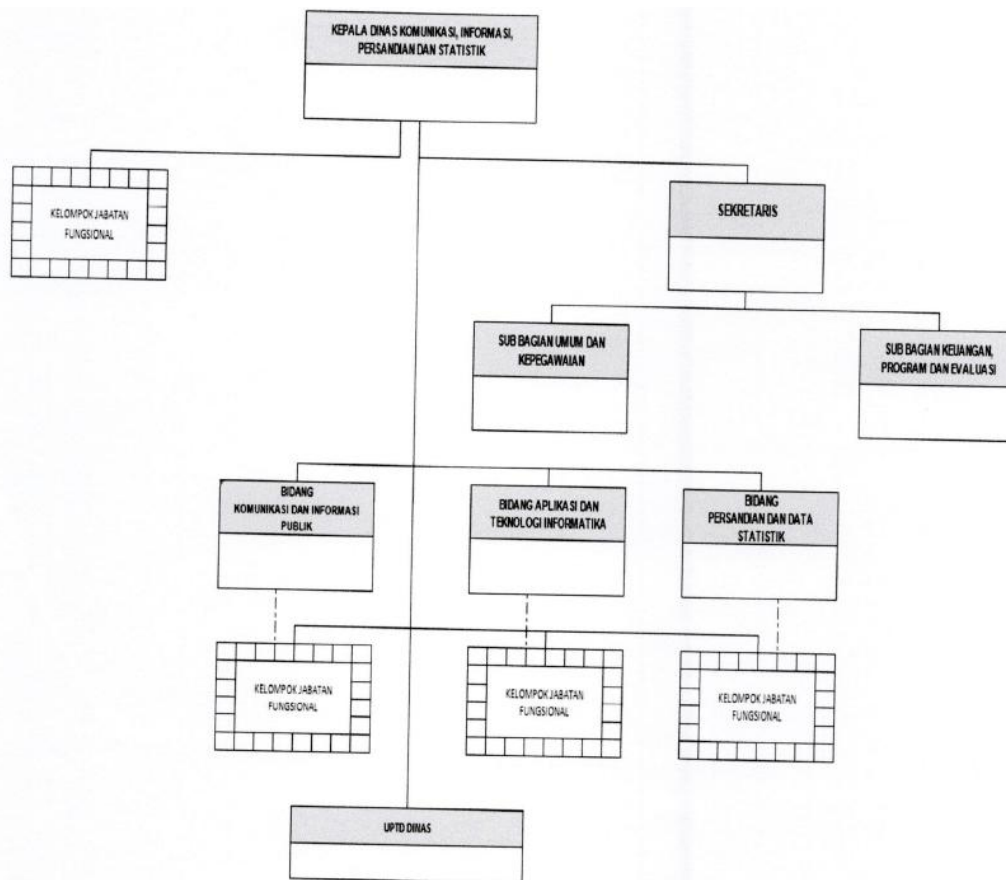
Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi;
- c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- d. Bidang Aplikasi dan Teknologi Informatika;
- e. Bidang Persandian dan Data Statistik;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Serang yaitu sebanyak 63 orang, Sumber daya manusia dapat dilihat dari kondisi kualifikasi personil DISKOMINFO Kabupaten Serang yang mencakup :

1. Jumlah, Status kepegawaian
2. Pangkat dan golongan
3. Pendidikan Umum (S2, S1, D3, SLTA, SMP, SD)
4. Jenis Kelamin

a. Berdasarkan status kepegawaian

Sumber daya manusia di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang dengan status kepegawaian terbagi atas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Non PNS sebagaimana ditunjukkan pada



tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Menurut Status dan Jenis kelamin

No.	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki - laki	Perempuan	
1	ASN	17	10	27
2	PPPK	2	1	3
3	NON PNS	23	10	33
TOTAL		42	21	63

Sumber Data : Subbagian Umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2025

b. Berdasarkan status dan Golongan

Data kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menurut status dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

GOLONGAN	CPNS	PNS	PPPK	NON PNS
IV.b	-	1	-	
IV.a	-	4	-	
III.d	-	7	-	
III.c	-	3	-	
III.b	-	4	-	
III.a	1	5	-	
II.d	-	-	-	
II. c	-	2	-	
IX	-	-	2	
V	-	-	1	
NON PNS	-	-	-	33
TOTAL	1	26	3	33

Sumber Data : Subbagian Umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2025

c. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dapat disebutkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :



Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan Akhir	Jumlah	Persentase
SD	3	4,76%
SLTP	1	1,58%
SLTA	14	22,22%
D3/D4	3	4,76%
S1	32	50,79%
S2	10	15,87%
S3	-	0%
Jumlah	63	100%

Sumber Data : Subbagian Umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2025

d. Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dapat disebutkan pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	CPNS	PNS	PPPK	NON PNS
Laki - Laki	-	17	2	23
Perempuan	1	9	1	10
TOTAL	1	26	3	33

Sumber Data : Subbagian Umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2025

Sarana dan Prasarana Kantor

Dalam pelaksanaan program kegiatan perlu adanya sarana dan prasarana pendukung yang dapat menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang sudah memiliki Gedung Kantor pada Pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Serang pada Blok B3.

Adapun penunjang lainnya yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang, seperti komputer, jaringan dan menara NOC, kendaraan bermotor roda dua, roda empat dan lain-lain.

Berikut disebutkan rincian data barang milik daerah pada Diskominfo Kabupaten Serang :



Tabel 2.5.
Jumlah Sarana dan Prasarana Diskominfo

No	Nama Barang	Kondisi Barang			Jumlah	Satuan
		Baik	Sedang	Rusak Berat		
1	Mikro bus	-	-	1	1	Unit
2	Mini bus suzuki ertiga	3	-	-	3	Unit
3	Mini bus kijang inova	2	-	-	2	Unit
4	Mini bus toyota rush	1	-	-	1	Unit
5	Mini Bus Avanza	1	-	-	1	Unit
6	Sepeda motor	4	1	1	6	Unit
7	Mesin ketik listrik	1	-	-	1	Unit
8	Mesin penghitung uang	1	-	-	1	Unit
9	Lemari Besi	1	-	-	1	Unit
10	Lemari Kayu	5	-	-	5	Unit
11	Filing Cabinet Besi	1	-	-	1	Uni
12	Locker	7	-	-	7	Unit
13	CCTV- Camera Control Television System	10	-	-	10	Unit
14	Alat Penghancur Kertas	1	-	-	1	Unit
15	Mesin absensi	1	-	-	1	Unit
16	LCD Projector/Infocus	1	-	-	1	Unit
17	Papan reklame	9	-	-	9	Buah
18	Meja Kerja Kayu	4	-	-	4	Buah
19	Kursi Besi/Metal	4	-	-	4	Buah
20	Sofa Tamu	3	-	-	3	Buah
21	Meja Rapat	1	-	-	1	Buah
22	Meja Recesepsionis	1	-	-	1	Buah
23	Kursi Rapat	20	-	-	20	Buah
24	Kursi tamu	1	-	-	1	Buah
25	Kursi putar	8	-	1	9	Buah
26	Sofa	5	-	-	5	Buah
27	Meubelair lainnya	10	-	-	10	Unit
28	Ac split panasonic	25	-	-	25	Unit
29	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	8	-	-	8	Unit
30	Kitchen set	1	-	-	1	Unit
31	Televisi	6	-	-	6	Unit
32	Loudspeaker	2	-	-	2	Buah
33	Sound System	1	-	-	1	Buah
34	Camera Video	1	-	-	1	Buah
35	Vertikal Blind	24	-	-	24	Meter
36	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	-	-	1	Buah
37	Alat pemadam/portable	1	-	-	1	Buah
38	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	-	-	5	Buah



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERANG

No	Nama Barang	Kondisi Barang			Jumlah	Satuan
		Baik	Sedang	Rusak Berat		
39	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4	-	-	4	Buah
40	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	-	-	1	Buah
41	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	1	-	-	1	Buah
42	Meja tamu biasa	1	-	-	1	Buah
43	Kursi kerja pejabat eselon II	1	-	-	1	Buah
44	Kursi kerja pejabat eselon III	5	-	-	5	Buah
45	Kursi kerja pejabat eselon IV	3	-	-	3	Buah
46	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	50	-	-	50	Buah
47	Kursi hadap depan meja kerja pejabat Esselon II	2	-	-	2	Unit
48	Kursi hadap depan meja kerja pejabat Esselon III	8	-	-	8	Unit
49	Kursi hadap depan meja kerja pejabat Esselon V	26	-	-	26	Unit
50	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	2	-	-	2	Unit
51	Audio Mixing Portable	2	-	-	2	Unit
52	Microphone/Wireless MIC	5	-	-	5	Buah
53	Microphone/Boom Stand	2	-	-	2	Buah
54	Professional sound system	1	-	-	1	Buah
55	Uninterruptable power supply	3	-	-	3	Buah
56	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	-	-	1	Buah
57	Digital Audio Storage System	1	-	-	1	Buah
58	Camera elektronik	1	-	-	1	Buah
59	Tripod camera	5	-	-	5	Buah
60	Head set	8	-	-	8	Unit
61	Camera digital	2	-	-	2	Buah
62	Lampu bllitz kamera	1	-	-	1	Unit
63	Monopod	1	-	-	1	Unit
64	Clipp On	4	-	-	4	Unit
65	Camera Conference	1	-	-	1	Unit
66	Sound Card Eskternal	1	-	-	1	Unit
67	Wireles Video Transmitter	1	-	-	1	Unit
68	Capture HDMI	1	-	-	1	Unit
69	Display Screen	1	-	-	1	Unit
70	Network Router	2	-	-	2	Unit
71	Kamera Udara	1	-	-	1	Unit
72	Telephone (PABX)	1	-	-	1	Unit
73	Pesawat telephone	1	-	-	1	Unit
74	Telphone mobile	5	-	-	5	Unit



No	Nama Barang	Kondisi Barang			Jumlah	Satuan
		Baik	Sedang	Rusak Berat		
75	Telepone Digital	3	-	-	3	Unit
76	Alat Komunikasi Lainnya	1	-	-	1	Unit
77	Unit pemancar vhf/fm stationary	1	-	-	1	Buah
78	Self supporting tower/ Menara NOC	2	-	-	2	Unit
79	Peralatan Antena Pemancar MF+HF Stationary	1	-	-	1	Unit
80	Camera Digital	1	-	-	1	Unit
81	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	-	-	1	Unit
82	Pc unit	12	-	-	12	Unit
83	Laptop	15	-	-	15	Unit
84	Note book	12	-	-	12	Unit
85	Hardisk	2	-	-	2	Unit
86	Printer	12	-	-	12	Unit
87	Scanner	1	-	-	1	Unit
88	External	5	-	-	5	Unit
89	Keyboard	3	-	-	3	Unit
90	External/Portable Hardisk	3	-	-	3	Unit
91	Server	5	-	-	5	Unit
92	Router	12	-	-	12	Buah
93	Rak server	2	-	-	2	Unit
94	Firewall	1	-	1	2	Unit
95	Wireless Access Point	18	-	-	18	Unit
96	Switch	30	-	-	30	Unit
97	Acces Point	120	-	-	120	Unit
98	Peralatan jaringan dan lain lain	8	-	-	8	Buah
99	Peralatan Komputer Lainnya	16	-	-	16	Unit
100	Bangunan Menara Telepon	22	-	-	22	Unit
101	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan	1	-	-	1	Unit
102	Dan Frenceise Lisensi	4	-	-	4	Unit
103	Hak Cipta	8	-	-	8	Unit
104	Software	-	-	3	3	Unit

Sumber Data : Subbagian Umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan atau tidaknya kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2025 - 2029 dapat diukur dengan melihat tercapai atau tidaknya target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra. Tercapainya target dari indikator kinerja sasaran yang telah



ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang, dapat disimpulkan bahwa kinerja pada Diskominfo Kabupaten Serang bernilai baik dan sebaliknya.

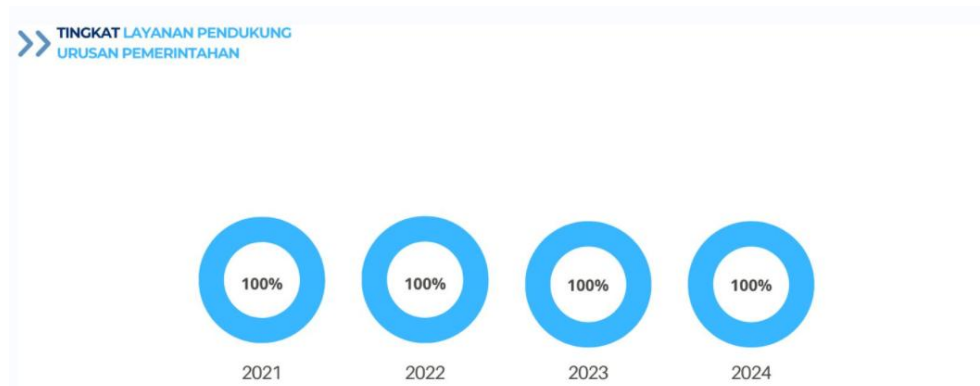


Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Tahun Ke-								Rasio Capaian Pada Tahun Ke- dalam %			
					2021		2022		2023		2024		2021	2022	2023	2024
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	65%	92,48%	70%	92,55%	75%	98,37%	80%	94,60%	142,28	132,21	131,16	118,25
				Indeks Kematangan Penerapan SPBE	2,98	2,64	2,98	2,64	2,98	3,23	2,99	3,73	88,59	88,59	108,39	124,75
				Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	100	184	120	184	140	240	160	397	184	153,33	171,43	248,13
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	50%	50%	60%	60%	70%	70%	80%	80%	100	100	100
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B(70-85)	C (67,66)	B(70-85)	C (69,87)	B(70-85)	B (81,25)	B (70-85)	B (81,69)	79,60	82,20	95,59	96,11	

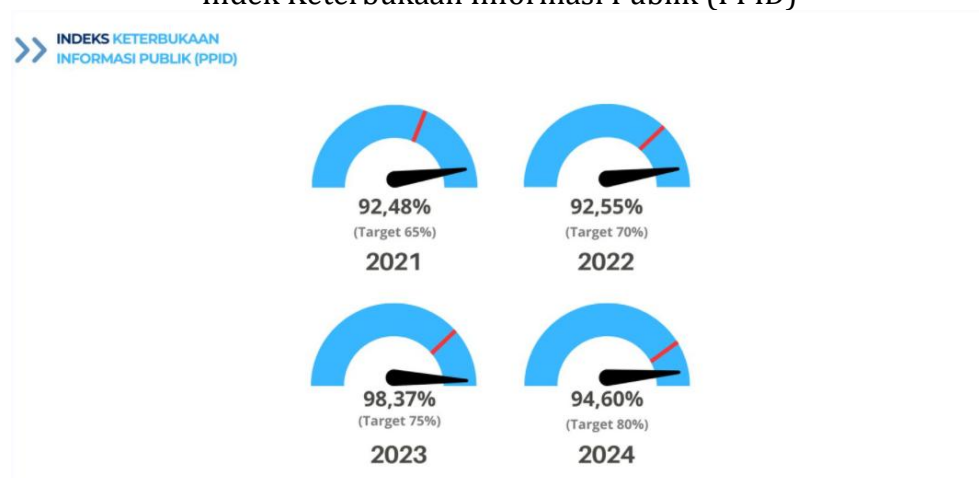
Sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, sejumlah indikator seperti SPBE, PPID, KAMI, dan IKM telah diatur melalui berbagai regulasi. Masing-masing indikator memiliki konsekuensi atau sanksi tertentu apabila tidak dipenuhi, baik dari segi reputasi instansi, penilaian kinerja, hingga risiko intervensi audit. Dari tabel diatas dapat di jelaskan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Selama empat tahun berturut-turut, tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan di Diskominfo Kabupaten Serang konsisten mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan internal, mulai dari pemanfaatan teknologi informasi, penguatan koordinasi antar bidang, hingga digitalisasi proses pelayanan.

Gambar 2.3
Indek Keterbukaan Informasi Publik (PPID)



Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Serang terus meningkat signifikan dari 2021 hingga 2024, mencerminkan komitmen pada transparansi. Hal ini tidak terlepas dari penguatan peran PPID, peningkatan layanan informasi digital, serta pembinaan rutin terhadap

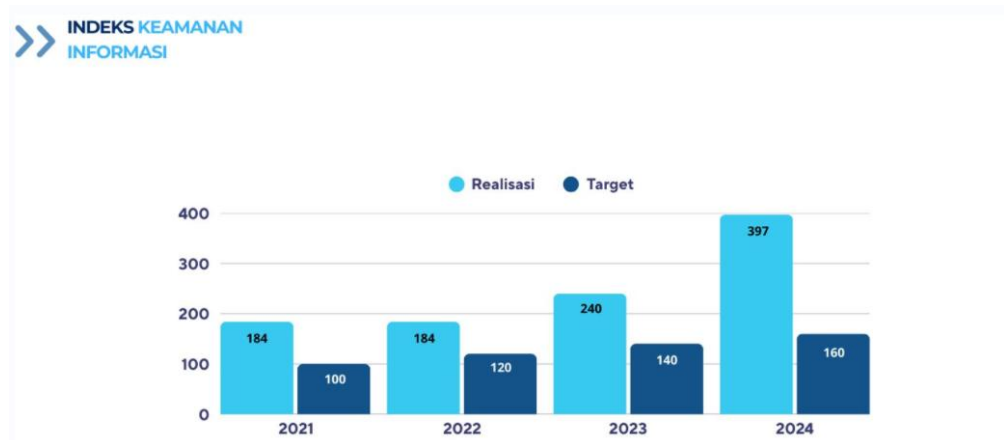
perangkat daerah dalam pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi publik .

Gambar 2.4
Indek Kematangan Penerapan SPBE



Indeks SPBE Kabupaten Serang meningkat signifikan dari 2,64 (2022) menjadi 3,73 (2024), melampaui target nasional 3,12. Capaian ini didorong oleh kebijakan atau regulasi yang memadai, implementasi tanda tangan elektronik, integrasi layanan melalui aplikasi SERBA DIGI, dan penguatan diseminasi informasi digital. Peningkatan ini juga menjadi bentuk kepatuhan terhadap PermenPANRB No. 59 Tahun 2020, yang mewajibkan tindak lanjut atas hasil evaluasi SPBE.

Gambar 2.5
Indek Keamanan Informasi



Indeks Keamanan Informasi di Diskominfo Kabupaten Serang menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2021, yang mengindikasikan adanya upaya penguatan sistem dan kebijakan keamanan informasi. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan data serta implementasi program atau kebijakan strategis di bidang Bidang Persandian dan Data Statistik. Selain itu, untuk tahun 2025 sudah terbit Surat Ketetapan Tim Tanggap Insiden Siber yang berpotensi menaikkan angka Indeks KAMI.

Gambar 2.6
Cakupan Data Statistik Sektorial Yang di Publikasikan



Peningkatan cakupan data statistik sektorial oleh Diskominfo Kabupaten Serang mencerminkan dampak positif dari program seperti Satu Data, Forum Data, dan pengembangan Portal Open Data, yang mendorong transparansi dan pengambilan kebijakan berbasis data. Hal ini tercermin dari hasil penilaian Indeks Pembangunan Statistik yang di laksanakan oleh Badan Pusat Statistik di tingkat Nasional.

Gambar 2.7
Indeks Kepuasan Masyarakat



Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Diskominfo Kabupaten Serang mencerminkan dampak positif dari upaya berkelanjutan, seperti optimalisasi kanal digital, edukasi publik, dan perbaikan layanan informasi. Tren ini menunjukkan meningkatnya persepsi positif masyarakat terhadap layanan yang diberikan.



2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang selama periode RENSTRA 2025-2029 meliputi :

1. **Masyarakat umum.**

- Sebagai penerima informasi publik dan layanan aduan masyarakat.
- Edukasi literasi digital dan penggunaan internet secara bijak.

2. **Perangkat daerah.**

- Untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Penyediaan Infrastruktur TIK dan aplikasi layanan pemerintahan.

3. **Media Massa.**

Sebagai mitra dalam penyebaran informasi publik yang akurat dan terpercaya.

4. **Komunitas dan Organisasi Masyarakat.**

Untuk peningkatan kapasitas literasi digital dan partisipasi dalam penyebaran informasi positif.

5. **Pelaku usaha dan start up.**

Dalam hal promosi digital, penyediaan data, atau pelatihan teknologi informasi.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- *Analisis Lingkungan Internal*
- *Kekuatan/ Strength (S)*
 - Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Serang cukup memadai hal ini dapat dilihat dari komposisi golongan, pangkat dan eselonisasi jabatan serta latar belakang pendidikan, sehingga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat akan bisa dicapai. Dan banyaknya jumlah pegawai yang mengisi jabatan fungsional mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Serang dalam membangun birokrasinya lebih berorientasi kepada kekuatan keahlian (*Expert Power*).
 - Peningkatan kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan trend yang semakin meningkat, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Serang memiliki kemampuan untuk membiayai belanja sektor pembangunan yang akan dikembangkannya. Pendapatan dimaksud berasal dari bagian hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



- Adanya Kepemimpinan Kepala Daerah yang memiliki kapabilitas, akseptabilitas dan mobilitas serta aktivitas yang tinggi, memungkinkan aspirasi yang berkembang lebih cepat diakomodasi, juga memiliki kemampuan membangun Partner Aliansi Strategic dengan berbagai lembaga pemerintahan, seperti misalnya legislatif, yudikatif, dan alim ulama serta ormas, orsospol dan juga lembaga-lembaga Non Pemerintah (NGO) atau LSM.
- Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat di negara kita kian merambah ke berbagai sektor, termasuk diantaranya pada sistem manajemen Pemerintahan Daerah. Begitu pula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang sudah lama telah diterapkan teknologi informasi di berbagai bidang pemerintahan terutama pada sektor layanan publik. Kondisi tersebut sangat memudahkan pengembangan aplikasi electronic government (e-government) pada Pemerintah Kabupaten Serang.
- Salah satu sarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Internet Service dan Web Service. Hal ini memungkinkan hubungan administrasi antar OPD Pemerintahan di berbagai level dilakukan secara efektif dan professional.
- *Kelemahan/ Weakness (W)*
 - Penilaian masyarakat terhadap lemahnya citra birokrasi lebih disebabkan oleh faktor sumber daya aparatur yang tidak profesional dalam pelayanan dengan didukung sistem administrasi yang tidak terstruktur. Manajemen pemerintahan yang baik harus didukung dengan standar baku operasional yang sering kita kenal dengan *standard operating procedure* (SOP). Belum tersusunnya SOP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang menjadi salah satu titik kelemahan yang menyebabkan penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien.
 - Kinerja pelayanan publik masih belum memuaskan para pengguna jasa publik, terutama warga masyarakat, pelaku bisnis dan para investor. Hal ini terkait dengan prosedur dan tata cara pelayanan yang belum mengarah kepada penerapan konsep “One-Stop Service” karena



memang dalam pelaksanaannya masih terkesan birokratis, persyaratan yang berbelit-belit dan lamanya waktu yang diperlukan tidak tetap serta biaya pelayanan yang tidak pasti.

- Daya dukung prasarana dan sarana perkotaan belum memadai, seperti kurangnya penyediaan air bersih dan air kotor, persampahan, kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan sarana lalu lintas, terjadinya banjir merupakan indikasi utama mengapa sangat segera perlu ditingkatkannya prasarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan Kabupaten Serang sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang belum efisien. Hal ini disebabkan karena belum tertatanya sistem pembiayaan, sistem penganggaran dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Dengan demikian terkesan bahwa pengelolaan uang rakyat (public money) belum dilakukan secara transparan dengan mendasarkan kepada konsep Value for Money (ekonomis, efisiensi, dan efektif), sehingga tercipta akuntabilitas publik dan aset daerah belum optimal.
- *Analisis Lingkungan Eksternal*
 - *Peluang/ opportunities (O)*
 - Kabupaten Serang yang lokasinya tidak jauh dari Jakarta sebagai ibukota Negara dan dengan dibukanya Interchange Cikande telah mengakibatkan volume arus lalu lintas dan tingkat mobilitas penduduk antara Jakarta - Serang dan daerah sekitarnya menjadi cukup tinggi, sehingga telah meningkatkan jumlah investor;
 - Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang pada periode 2023-2024. Jika pada Tahun 2023 LPE Kabupaten Serang mencapai 5,04%, pada tahun 2024 turun menjadi 4,84%.
 - Adanya pelimpahan urusan/ kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang membuka peluang seluas-luasnya pengembangan potensi daerah dalam rangka mendukung perwujudan visi Kabupaten Serang ke depan. Selain hal tersebut semangat otonomi daerah yang luas membuka peluang



daerah untuk terus meningkatkan perbaikan pelayanan publik dan optimalisasi peningkatan dan pertumbuhan perekonomian.

- *Ancaman/ Treaths (T)*

- Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang menjunjung nilai harmoni dan persaudaraan serta persahabatan menjadi masyarakat yang radikal progresif telah menimbulkan konflik yang sangat meresahkan, sehingga mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, hal ini mengancam terhadap pertumbuhan iklim investasi yang kondusif.
- Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan penurunan intensitas perdagangan dan lemahnya sektor usaha jasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi perekonomian di Kabupaten Serang sebagai kota jasa.
- Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat mendorong pertumbuhan aspek-aspek ekonomi, sosial, politik, kebudayaan dan sebagainya. Perkembangan penduduk di Kabupaten Serang selama ini menunjukkan peningkatan dan ini dapat dilihat dari jumlah penduduk pada Semester II Tahun 2024 sebanyak 1.791.795 jiwa, meningkat menjadi sebanyak 1.815.551 pada Semester I Tahun 2025.
- Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Kebijakan sektor perbankan saat ini belum menyentuh langsung industri kecil dan menengah yang telah terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi. Peluang investasi pada industri lokal masih terbuka luas, namun demikian prosentase penyaluran dana pengembangan usaha kecil menengah masih kecil dibandingkan dengan prosentase penyaluran dana pada industri besar.
- Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kabupaten Serang, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi pembangunan



kota begitu pesat dengan tingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunan lahan terbuka hijau yang akan berakibat pada pemanasan global (*global warming*).

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN

Atas dasar tersebut maka faktor kunci keberhasilan adalah : untuk mewujudkan pusat pelayanan Informasi menuju Kabupaten Serang sebagai kota jasa yang diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Diskominfo dan seluruh untuk merealisasi komitmen tersebut maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor kunci keberhasilannya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut adalah :

1. Kemitraan yang kuat dari seluruh aparatur Diskominfo untuk membangun kualitas pusat pelayanan Informasi.
2. Kerjasama yang harmonis dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dalam rangka menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk mempercepat penyampaian Informasi kepada OPD dan ditindaklanjuti sehingga mempertebal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
3. Adanya dukungan kemitraan dari rekan kerja Diskominfo seperti; Media Massa daerah maupun nasional, ORARI, RAPI dan kelompok informasi lainnya sebagai media Komunikasi dan Publikasi sehingga dapat mempercepat sosialisasi program/kebijakan Pemerintah.
4. Tersedianya kualitas SDM di bidang Informasi dan Komunikasi dengan mengikut sertakan pegawai dalam diklat.
5. Tersedianya berbagai Informasi dan layanan dari dinas/instansi di lingkungan Pemerintah pada Portal Layanan terpadu yang dibutuhkan masyarakat.
6. Tersedianya regulasi dan kebijakan daerah terkait transformasi digital penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Serang.
7. Tersedianya Layanan Internet seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan;



8. Optimalisasi integrasi dan konsistensi Data Sektoral Daerah.
9. Penguatan Keamanan Informasi serta Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Tantangan

Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu;

1. Belum adanya masterplan tentang teknologi komunikasi dan informasi;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kompetensinya;
3. Keterbatasan anggaran;
4. Konektivitas internet di Perangkat Daerah masih belum optimal;
5. Satu Data untuk Pembangunan Kabupaten Serang belum optimal;
6. Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Kabupaten Serang belum optimal;
7. Penerapan Transformasi Digital SPBE Belum Optimal.

Peluang

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang yaitu:

1. Mewujudkan Program Smart City Kabupaten Serang;
2. Pelatihan atau Bimtek bidang komunikasi dan informasi secara terus menerus dilakukan baik aparatur maupun kelompok masyarakat;
3. Adanya pusat data Kab. serang sebagai rujukan kebijakan pimpinan;
4. Memberikan peluang bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah sebagai modal pembangunan daerah;
5. Ketersediaan alat informasi melalui media yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang (Radio Serang Gawe FM/AM, internet, pelayanan pengaduan publik, dll);
6. Tingginya peran aktif masyarakat dalam mensosialisasikan program/kegiatan Pemerintah Kab. Serang melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan mitra kerja lainnya;
7. Ketersediaan bandwidth yang ada sehingga dapat diakses secara maksimal;



8. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Serang dalam pengembangan komunikasi dan informatika;
9. Adanya komitmen semua unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugas.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi permasalahan atau gambaran umum daerah masa kini khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang menurut Perda RPJMD yaitu;

Tabel 2.7.

Permasalahan Per Urusan Pemerintah Daerah	KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029
16. Implementasi e-Government belum optimal memberikan pelayanan digital, cepat, mudah, dan murah sehingga masyarakat terlayani dengan baik, antara lain diindikasikan dari indeks SPBE pada tahun 2024 sebesar 3,73.	a. Belum optimalnya penggunaan teknologi sistem informasi dalam mengembangkan Kabupaten Serang yang unggul, nyaman dan sejahtera; b. Peningkatan implementasi e-Government Pemerintah Daerah.	Aksesibilitas teknologi informasi seperti ketersediaan jaringan internet pada suatu wilayah serta pemanfaatan teknologi informasi pada pelayanan pemerintahan masih belum optimal.
20. Ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral masih belum optimal dijelaskan oleh Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan.		Keterbukaan dan akses data di Kabupaten Serang perlu ditingkatkan.
21. Pengaturan keamanan pada penggunaan sarana prasarana Teknologi informasi dan komunikasi masih belum optimal.		a. Belum optimalnya sarana dan prasarana persandian; b. Belum optimalnya pengelolaan asset persandian; c. Belum kuatnya tata Kelola keamanan informasi; d. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia pemerintah.



Kondisi permasalahan atau gambaran umum daerah masa kini khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang menurut Internal Perangkat Daerah yaitu :

Tabel 2.8.

Permasalahan	Solusi
Maraknya berita hoak dan konten negatif di media sosial	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Literasi Media• Verifikasi Fakta• Berbagi dengan Bijak• Menggunakan Teknologi• Pendidikan dan Kesadaran
Minimnya system pengawasan layanan publik, rentan pungli (Perizinan, Kependudukan, Ketenagakerjaan, dll	<ul style="list-style-type: none">• Digitalisasi pelayanan public melalui Portal Layanan Terpadu (Aplikasi Serang Bahagia)• Meneruskan pengaduan melalui kanal SP4N Lapor atau PPID Kepada Perangkat Daerah pengampu• SK Tim Pungli
Belum Optimalnya penerapan transformasi digital Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none">• Pembaharuan kebijakan internal• Sosialisasi transformasi digital SPBE• Monitoring dan Evaluasi SPBE• Integrasi Layanan Seluruh Perangkat Daerah
Kurangnya koordinasi antar Tim Pengelola Infomasi dan TIK	<ul style="list-style-type: none">• Komunikasi intensif dengan para pewarta/pelaku media siber serta melakukan klarifikasi melalui media siber atau akun resmi Pemerintah Kabupataen Serang• Mengoptimalkan dan memperbaharui SK TIM/Media sosial/PPID dalam rangka percepatan penyelesaian pengaduan maupun penyebaran informasi yang positif
Lemahnya Data Pemerintahan Daerah dan Rendahnya Literasi Keamanan Informasi di Level Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS)• Melakukan monitoring dan Evaluasi kerentanan keamanan informasi• Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)• Sosialisasi Literasi Keamanan Informasi
Belum optimalnya integrasi data dan validasi data daerah	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas dan integrasi data sektoral untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia



2.2.2. Isu Strategis

Dalam penentuan isu strategis

Isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang antara lain disajikan dalam tabel berikut;

Tabel 2.9.
Isu-Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Potensi Industri dan Kawasan Ekonomi 2. Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Kelautan dan Perikanan 4. Pariwisata dan Warisan Budaya 5. Letak Geografis Strategis 6. Sumber Daya Manusia dan Pendidikan	7. Maraknya berita hoak dan konten negatif di media sosial. 8. Minimnya system pengawasan layanan publik, rentan pungli (Perizinan, Kependudukan, Ketenagakerjaan, dll. 9. Belum Optimalnya penerapan transformasi digital Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 10. Kurangnya koordinasi antar Tim Pengelola Infromasi dan TIK. 11. Lemahnya Data Pemerintahan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta bebas KKN disertai dengan pelayanan yang ramah.	1.Kesenjangan Digital (Digital Divide): Meskipun konektivitas global meningkat, masih terdapat tantangan dalam memastikan akses yang adil terhadap informasi dan teknologi, terutama antara negara maju dan berkembang. 2.Integritas dan Independensi Data: Organisasi statistik global perlu menjaga nilai-nilai etis, independen, dan	1. Pembangunan Infrastruktur Digital yang Andal: Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman, andal, dan berkualitas tinggi di seluruh wilayah Indonesia. 2. Tata Kelola Pemerintahan Digital (e-Government): Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas. 3. Pengembangan	1.Infrastruktur dan Konektivitas: Kesenjangan digital antar wilayah, akses internet berkualitas, dan pembangunan pusat data terintegrasi masih menjadi pekerjaan rumah. 2.Tata Kelola Data dan Statistik: Masih rendahnya kualitas, ketersediaan, dan pemanfaatan data statistik sektoral untuk pengambilan kebijakan, serta belum optimalnya integrasi data antar dinas. 3.Keamanan	1. Keterbukaan Informasi Publik melalui Media Layanan Pengaduan. 2. Penyebaran Informasi yang positif melalui Literasi Digital 3. Terwujudnya Smart City Kabupaten Serang melalui strategi pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dengan arah kebijakan integrasi pelayanan di seluruh instansi pemerintahan, sebagai leading sector dilaksanakan oleh urusan Komunikasi dan informatika serta didukung oleh semua urusan pemerintahan lainnya. 4. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah. 5. Peningkatan implementasi e-Government atau SPBE Pemerintah Daerah. 6. Pengembangan pusat data yang aman dan handal. 7. Koordinasi dan kerjasama



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	<p>Daerah dan Rendahnya Literasi Keamanan Informasi di Level Daerah.</p> <p>12. Belum optimalnya integrasi data dan validasi data daerah.</p>		<p>tidak bias dalam pengumpulan dan penyebaran data untuk memastikan kepercayaan publik.</p> <p>3. Manajemen Kunci Kriptografi: Pengelolaan kunci dalam sistem persandian menjadi bagian paling kritis untuk menjaga kerahasiaan data, yang memerlukan praktik terbaik dan pedoman komprehensif secara global.</p>	<p>Ekosistem Digital: Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada platform strategis nasional seperti pusat data dan identitas digital.</p> <p>4. Peningkatan Literasi dan Budaya Digital: Membangun sumber daya manusia (SDM) yang terampil secara digital dan masyarakat yang berbudaya digital untuk memanfaatkan bonus demografi.</p> <p>5. Harmonisasi Regulasi: Menata regulasi di bidang komunikasi dan informasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan investasi.</p> <p>6. Peningkatan Kualitas Data Statistik: Menjamin ketersediaan data statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna kebijakan.</p> <p>7. Integrasi dan</p>	<p>Informasi dan Persandian: Perlunya pengawasan dan kesadaran keamanan informasi di kalangan ASN dan masyarakat, serta penguatan fungsi persandian untuk melindungi data strategis daerah.</p>	<p>pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan.</p> <p>8. Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</p> <p>9. Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Simplikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah</p>



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
				<p>Sinkronisasi Data: Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan sinkronisasi data lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah melalui inisiatif Satu Data Indonesia.</p> <p>8. Penerapan Proses Bisnis Berstandar Internasional: Menerapkan proses bisnis statistik berbasis digital dan berstandar internasional untuk efisiensi dan akurasi.</p> <p>9. Penguatan Kapabilitas SDM Statistik: Meningkatkan kapasitas SDM di bidang statistik untuk mendukung pengelolaan data yang efektif.</p> <p>10. Keamanan Informasi dan Siber: Menjamin keamanan informasi dan infrastruktur digital nasional dari ancaman siber yang semakin kompleks.</p> <p>11. Pemanfaatan Persandian Daerah: Meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan teknik</p>		



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
				persandian di tingkat daerah untuk mengamankan data dan komunikasi pemerintahan. 12. Peningkatan Jaringan Telekomunikasi dan Persandian: Memperkuat jaringan telekomunikasi yang mendukung fungsi persandian dan keamanan siber.		



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur Kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG BAHAGIA"

Visi Pembangunan kabupaten Serang Tahun 2025-2029 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2024-2045 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang 2025-2045 yaitu: *"KABUPATEN SERANG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKELANJUTAN DAN AGAMIS"* dalam konteks keterpaduan pembangunan nasional dan provinsi, Visi Kabupaten Serang tahun 2025-2029 merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Kabupaten Serang untuk pencapaian Visi pembangunan Provinsi Banten dan visi pembangunan nasional.

Bertitik tolak dari visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029, maka misi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan



ekonomi dan daya saing daerah.

3. Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan Kabupaten Serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan.
5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima.
6. Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dalam kerangka keterpaduan pembangunan nasional dan provinsi, misi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Kabupaten Serang untuk mendukung pencapaian misi pembangunan Provinsi Banten dan misi pembangunan nasional.

Dari keenam misi di atas rumusan Misi ke 5 daerah Kabupaten Serang 2025-2029 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta perlu mendapat dukungan dan diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang yaitu :

**“Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi
pada pelayanan publik prima”**

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan peran serta tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang.

a. Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap Perangkat Daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan



menangani isu strategis setiap Perangkat Daerah . Tujuan Perangkat Daerah harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap OPD.

Dalam menentukan tujuan harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur dan target selama lima tahun kedepan. Pernyataan tujuan dijabarkan dalam 1 (satu) atau lebih sasaran Perangkat Daerah.

Tujuan juga merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Selanjutnya Visi dan misi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam tujuan yang diemban Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Serang.

Tujuan DISKOMINFO Kabupaten Serang sesuai dengan Misi 5 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima adalah :

***"MEWUJUDKAN TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL
YANG TERINTEGRASI, SATU DATA STATISTIK YANG AKURAT DAN
PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI YANG HANDAL"***

b. Sasaran

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap Perangkat Daerah. Pernyataan sasaran bukan merupakan kalimat aktivitas, dan disusun dengan diawali dengan kata seperti meningkatnya atau menurunnya.

Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (eselon II), yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah.

Sasaran juga merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel 3.1.

Tujuan dan Rumusan RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029 dan Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tabel 3.1.1

Tujuan dan Rumusan RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Misi 5 Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih handal, dan berorientasi pada pelayanan publik prima	T.5.1 Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan prima		Indeks Reformasi Birokrasi	77,4	78,1	78,8	79	81	83,2
			S5.1.1: Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,75					
				Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)		1,2	1,2	1,3	1,3	1,4
				Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	88,50	88,75	88,90	88,95	90,00	91,00
			S5.1.7: Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,60	2,65	2,69	2,72	2,74	2,75
			S5.1.8: Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	497	597	697	772	829	832



Tabel 3.1.2
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

No	NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-							
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	S5.1.1: Terwujudnya Transformasi layanan Publik Berbasis Digital S5.1.7: Terwujudnya layanan statistic yang akurat dan dapat diandalkan S5.1.8: Meningkatnya Keamanan Informasi	Mewujudkan Transformasi layanan Publik berbasis Digital yang Terintegrasi, Satu Data Statistik Yang akurat Dan Pengelolaan Keamanan Informasi Yang handal	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,75	-	-	-	-	-			
				Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	-	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4		
					88,50	88,75	88,90	88,95	90,00	91,00		
				Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	2,60	2,65	2,69	2,72	2,74	2,75		
					497	597	697	772	829	832		
				Indeks Keamanan Informasi Keamanan								
			SPD.1.1. Meningkatkan kualitas layanan serta kinerja dan Akuntabilitas instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD Perangkat Daerah	BB (78,81)	BB (78,83)	BB (78,85)	BB (78,87)	A (80,01)	A (80,03)		
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,80	82,00	82,25	82,50	82,75	83,00		
			SPD.1.2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital Yang Terintegrasi	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,75	-	-	-	-	-		
				Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	-	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4		
			SPD.1.3. Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	88,50	88,75	88,90	88,95	90,00	91,00		
				Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,60	2,65	2,69	2,72	2,74	2,75		
			SPD.1.4. Meningkatkan kualitas layanan Statistik Sektoral	Indeks Keamanan Informasi Keamanan	497	597	697	772	829	832		
Indeks Keamanan data dan informasi digital												



3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Dalam merumuskan strategi dapat dilakukan melalui metode analisis S.W.O.T. Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/43ubli, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD 2025-2029

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG BAHAGIA				
MISI 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima				
NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	S5.1.1: Terwujudnya transformasi layanan Publik Berbasis Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan perluasan layanan public berbasis digital yang cepat, mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. • Perluasan akses/jangkauan layanan internet gratis untuk mendukung pengembangan kegiatan produktif potensial. • Peningkatan dan pengembangan aplikasi layanan publik yang terintegrasi. • Peningkatan kompetensi SDM untuk peningkatan layanan publik berbasis digital. 	<ul style="list-style-type: none"> • Literasi Digital (Sosialisasi pada Masyarakat). • Publikasi Pemberitaan yang positif (Pemberitaan Media Cetak, Online, Medsos, Media Elektronik dan Media Luar Ruang). • Penanganan Pengaduan SP4N Lapor (Pendampingan pada OPD yang terdampak Pengaduan). • Internet Seluruh Perangkat Daerah • Penyediaan Internet gratis di Ruang Publik • Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Layanan Publik • Pengembangan 	



			Sarana dan Prasarana Infrastruktur TIK • Pengembangan Sistem Berbasis Elektronik dan Smartcity.	
2.	S5.1.7: Terwujudnya layanan statistic yang akurat dan dapat diandalkan	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan dan peningkatan kualitas data dan informasi publik sesuai standar yang ditetapkan.• Pengembangan ekosistem data dan informasi di daerah.• Peningkatan kompetensi dan keahlian SDM bidang Statistic.	<ul style="list-style-type: none">• Buku Data Kabupaten Serang• Optimalisasi Satu Data Kabupaten Serang	
3.	S5.1.8: Meningkatnya keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan keamanan data dan layanan publik digital.• Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang publik pengamanan data dan informasi digital.	<ul style="list-style-type: none">• Keamanan Informasi untuk layanan Publik• Terbentuknya Tim Tanggap Insiden Siber Tanda Tangan Elektronik	



Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan birokrasi pemerintahan daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka perlu dikembangkan strategi sebagai berikut :

<p style="text-align: center;">ALI</p> <p style="text-align: center;">ALE</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan/Strength</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya aparatur yang memadai 2. Kecenderungan pendapatan daerah yang terus meningkat 3. Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspiratif 4. Pemerintah daerah telah menggunakan teknologi sistem informasi. 	<p style="text-align: center;">Kelemahan/Weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme SOP belum tersedia 2. Kinerja pelayanan 45ubic belum memuaskan pengguna jasa pelayanan publik 3. Belum optimalnya kinerja manajemen pemerintah daerah 4. Sarana dan prasarana perkotaan belum memadai 5. Pengelolaan keuangan dan asset daerah belum optimal.
<p style="text-align: center;">Peluang/Oportunity</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aksesibilitas tol merak dengan ibu kota Negara 2. Peningkatan laju pertumbuhan perekonomian LPE 3. Pengembangan kota jasa yang profesional 4. Pusat pendidikan, perekonomian dan Perdagangan yang luas 5. Adanya pelimpahan urusan/ kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah. 	<p style="text-align: center;">Strategi (S - O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang luas 2. Optimalisasi penggunaan teknologi sistem informasi dalam mendukung pengembangan Kabupaten Serang sebagai kota jasa. 3. Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspiratif mendorong pengembangan kota jasa yang profesional. 4. Pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan laju peningkatan perekonomian. 	<p style="text-align: center;">Strategi (W - O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif Peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.
<p style="text-align: center;">Ancaman/Threat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat yang cenderung mengarah pada kepentingan kelompok. 2. Krisis keuangan global. 3. Populasi tidak terkendali yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial. 4. Perbankan belum menjamin alokasi dana pada sektor riil dan sektor UKM. 5. Penurunan luas lahan terbuka hijau. 	<p style="text-align: center;">Strategi (S - T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menekan dampak permasalahan publik kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan Inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM 2. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan 	<p style="text-align: center;">Strategi (W - T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki manajemen layanan publik berbasis <i>reinventing government</i> 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.



Tabel 3.4
Penahapan Renstra PD Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Penguatan Tata Kelola Perangkat Daerah	Penguatan Kualitas Layanan Digital	Integrasi Layanan Dan Data Daerah	Optimalisasi Kinerja Layanan Digital	Pemantapan Keberlanjutan Transformasi Digital
Pengembangan Dasar Infrastruktur TIK	Penguatan Regulasi Pemerintahan Berbasis Digital	Integrasi Pemerintahan Berbasis Digital dan Satu Data Daerah	Optimalisasi Pemanfaatan Pemerintah Berbasis Digital Lintas Perangkat Daerah	Penguatan Tata Kelola Digital Berkelanjutan
Penguatan Layanan Informasi Komunikasi Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik	Integrasi Layanan Informasi Publik	Optimalisasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Pemantapan Budaya Keterbukaan Informasi
Penguatan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penguatan Koordinasi dan Standarisasi Statistik Sektoral	Integrasi Data Statistik Sektoral	Optimalisasi Pemanfaatan Data Statistik	Pemantapan sistem Statistik Sektoral Daerah
Penguatan Kebijakan dan Kesadaran Keamanan Informasi	Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi	Penguatan sistem Keamanan Informasi	Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi	Pemantapan Keamanan Informasi Berkelanjutan



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah menjabarkan Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah. Renstra PD memuat rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya bidang urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian.

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya guna memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar serta integrasi pembangunan wilayah dalam hal kebijakan dan perencanaan program, maka dalam proses penyusunan Renstra telah dilakukan tinjauan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, pertama Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD. Kedua Kerangka Pendanaan, dan Ketiga Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel sebagai berikut:



Tabel 4.1.
Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S5.1.1: Terwujudnya transformasi layanan Publik berbasis digital S5.1.7: Terwujudnya layanan statistic yang akurat dan Dapat diandalkan S5.1.8: Meningkatnya keamanan Informasi	Mewujudkan Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital Yang Terintegrasi , Satu Data Yang Akurat Serta Pengelolaan Keamanan Informasi Yang Handal	SPD.1.1. Meningkatnya kualitas layanan serta kinerja dan akuntabilitas instansi Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas instansi Pemerintah		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
					Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)		
					Indeks Keterbukaan Infromasi Publik (PPID)		
					Indeks Pembangunan Statistik		
					Indeks Keamanan Informasi		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat							
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Daerah dan kualitas tata Kelola instansi Perangkat Daerah				
				Tersedianya Data Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Data Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
				Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Bangunan Kantor		
				Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	
				Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Barang dan Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang dan Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Bahan/Material Yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Paket Mebel	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Paket Mebel Yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Data Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik Yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik Yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
					Dipelihara				
		SPD.1.2. Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis digital	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
						Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
						Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)			
						Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
						Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)			
						Tersedianya Data Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Serta Domain Pemerintah Desa	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Serta Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Serta Domain Pemerintah Desa	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Tersedianya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		
				Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Yang Sudah Ditempatkan DI Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Yang Sudah Ditempatkan DI Pusat Data Nasional	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
				Perangkat daerah di Pemerintah Kab/Kota Yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat daerah di Pemerintah Kab/Kota Yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
				Layanan Pemda Yang Memanfaatkan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah Terintegrasi, Yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Jumlah layanan Pemda Yang Memanfaatkan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah Terintegrasi, Yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
				Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Audit TK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Audit TK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
				Apikasi Khusus Yang di Bangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi	Jumlah Apikasi Khusus Yang di Bangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan	Koordinasi Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				SPBE	aplikasi SPBE		
				Laporan Operasional Pusat Kendali	Jumlah Laporan Operasional Pusat Kendali	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
				Aplikasi SPBE Yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
				Perangkat Daerah dan UPTD Yang Memanfaatkan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD Yang Memanfaatkan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas	Penyediaan Akses Internet	
				Dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
				Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Cerdas	Kabupaten atau Kota Cerdas		
		SPD.1.3. Meningkatnya kualitas layanan informasi publik			Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)		
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Komunitas Informasi Yang Aktif Mendesiminasikan Informasi dan Terdaftar Dalam Dinas Kominfo	Jumlah Komunitas Informasi Yang Aktif Mendesiminasikan Informasi dan Terdaftar Dalam Dinas Kominfo	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
				Laporan Dukungan Administrasi, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Yang Akuntabel Serta Disampaikan Kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Jumlah Laporan Dukungan Administrasi, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Yang Akuntabel Serta Disampaikan Kepada Kementerian Komunikasi dan	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Informatika		
				Permohonan Informasi Publik Yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Pelayanan Informasi Publik	
				Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik Yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik Yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
				Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah Yang Dikelola maupun Pemanfaatan Media Berbayar Sesuai Kriteria/Juknis	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah Yang Dikelola maupun Pemanfaatan Media Berbayar Sesuai Kriteria/Juknis	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
				Strategi Komunikasi Publik yang Disusun	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang Disusun	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
				Konten Informasi Publik	Jumlah Konten Informasi Publik	Penyusunan Konten	
				ASN Bidang Komunikasi Publik Yang Difasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik Yang Difasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
		SPD.1.4. Meningkatnya kualitas layanan statistik			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sektoral					
			Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Tersedianya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Kegiatan Statistik Sektoral Yang Sudah Mendapatkan Rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral Yang Sudah Mendapatkan Rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
				Kegiatan Statistik Sektoral Yang Telah Memenuhi Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan Kode Referensi dan/atau Data Indek	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral Yang Telah Memenuhi Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan Kode Referensi dan/atau Data Indek	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
				Kegiatan Statistik Sektoral Yang Hasilnya Dapat Diakses Oleh Pengguna Data	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral Yang Hasilnya Dapat Diakses Oleh Pengguna Data	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
				Pegawai Yang Mendapatkan Pelatihan Di Bidang Statistik	Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Pelatihan Di Bidang Statistik	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		SPD.1.5. Meningkatnya keamanan data dan informasi digital			Indeks Keamanan Informasi		
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Tersedianya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
				Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
				Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Layanan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Informasi dan Persandian	Keamanan Informasi dan Persandian		
				Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Yang Ditetapkan Baik Berupa Peraturan Gubernur, Maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Yang Digunakan Sebagai Panduan Dalam Menjalankan Penyelenggaraan Persandian	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Yang Ditetapkan Baik Berupa Peraturan Gubernur, Maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Yang Digunakan Sebagai Panduan Dalam Menjalankan Penyelenggaraan Persandian	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Berdasarkan Pemetaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Beroperasi	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Berdasarkan Pemetaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Beroperasi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Berdasarkan Pemetaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	



TABEL 4.2.
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN RENSTRA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SERANG

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.046.484.426		8.046.484.426		8.046.484.426		8.046.484.426		8.046.484.426		
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (78,80)	BB (78,83)		BB (78,85)		BB (78,87)		A (80,01)		A (80,03)			
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,69	82,00		82,25		82,50		82,75		83			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	18.080.000	2 Dokumen	18.080.000	2 Dokumen	18.080.000	100%	18.080.000	100%	18.080.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5 Dokumen	9.120.000	5 Dokumen	9.120.000	5 Dokumen	9.120.000	5 Dokumen	9.120.000	5 Dokumen	9.120.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan	8.960.000	4 Laporan	8.960.000	4 Laporan	8.960.000	4 Laporan	8.960.000	4 Laporan	8.960.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30 Orang/ Bulan	30 Orang/ Bulan	5.719.004.816	30 Orang/ Bulan	5.719.004.816	30 Orang/ Bulan	5.719.004.816	30 Orang/ Bulan	5.719.004.816	30 Orang/ Bulan	5.719.004.816		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	30 Orang/ Bulan	5.719.004.816	30 Orang/ Bulan	5.719.004.816	30 Orang/ Bulan	5.719.004.816	30 Orang/ Bulan	5.719.004.816	30 Orang/ Bulan	5.719.004.816		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	60.927.264	100%	60.927.264	100%	60.927.264	100%	60.927.264	100%	60.927.264		



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERANG

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	12 Dokumen	60.927.264	12 Dokumen	60.927.264	12 Dokumen	60.927.264	12 Dokumen	60.927.264	12 Dokumen	60.927.264	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	534.667.500	100%	534.667.500	100%	534.667.500	100%	534.667.500	100%	534.667.500	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yanga Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.686.000	1 Paket	10.686.000	1 Paket	10.686.000	1 Paket	10.686.000	1 Paket	10.686.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 paket	13.756.000	12 paket	13.756.000	12 paket	13.756.000	12 paket	13.756.000	12 paket	13.756.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	11.808.000	12 Dokumen	11.808.000	12 Dokumen	11.808.000	12 Dokumen	11.808.000	12 Dokumen	11.808.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	13.417.500	1 laporan	13.417.500	1 laporan	13.417.500	1 laporan	13.417.500	1 laporan	13.417.500	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	100%	49.001.918	100%	49.001.918	100%	49.001.918	100%	49.001.918	100%	49.001.918	



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERANG

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Urusan Pemerintah Daerah													
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Unit	10 unit	49.001.918	10 unit	49.001.918	10 unit	49.001.918	10 unit	49.001.918	10 unit	49.001.918		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.226.312.768	100%	1.226.312.768	100%	1.226.312.768	100%	1.226.312.768	100%	1.226.312.768		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Laporan	195.605.424	12 Laporan	195.605.424	12 Laporan	195.605.424	12 Laporan	195.605.424	12 Laporan	195.605.424		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	372.000.000	12 Laporan	372.000.000	12 Laporan	372.000.000	12 Laporan	372.000.000	12 Laporan	372.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	658.707.344	12 Laporan	658.707.344	12 Laporan	658.707.344	12 Laporan	658.707.344	12 Laporan	658.707.344		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	438.490.160	100%	438.490.160	100%	438.490.160	100%	438.490.160	100%	438.490.160		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	11 Unit	262.380.000	11 Unit	262.380.000	11 Unit	262.380.000	11 Unit	262.380.000	11 Unit	262.380.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	1 Unit	72 Unit	137.600.000	72 Unit	137.600.000	72 Unit	137.600.000	72 Unit	137.600.000	72 Unit	137.600.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	38.510.160	1 Unit	38.510.160	1 Unit	38.510.160	1 Unit	38.510.160	1 Unit	38.510.160		



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERANG

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				3.369.940.904		3.369.940.904		3.369.940.904		3.369.940.904		3.369.940.904	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	-	73,20		75,01		77,30		78,30		85,70		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	3.369.940.904	100%	3.369.940.904	100%	3.369.940.904	100%	3.369.940.904	100%	3.369.940.904	
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi Yang Aktif Mendesiminasikan Informasi dan Terdaftar Dalam Dinas Kominfo	-	355 Komunitas	17.600.000	355 Komunitas	17.600.000	355 Komunitas	17.600.000	355 Komunitas	17.600.000	355 Komunitas	17.600.000	
Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah Laporan Dukungan Administrasi, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Yang Akuntabel Serta Disampaikan Kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	-	12 Laporan	16.800.000	12 Laporan	16.800.000	12 Laporan	16.800.000	12 Laporan	16.800.000	12 Laporan	16.800.000	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	24 Dokumen	18 Permohonan	7.468.096	18 Permohonan	7.468.096	18 Permohonan	7.468.096	18 Permohonan	7.468.096	18 Permohonan	7.468.096	
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik Yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	-	1 Rekomendasi	100.000.000	1 Rekomendasi	100.000.000	1 Rekomendasi	100.000.000	1 Rekomendasi	100.000.000	1 Rekomendasi	100.000.000	



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERANG

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah Yang Dikelola maupun Pemanfaatan Media Berbayar Sesuai Kriteria/Juknis	760 Dokumen	4 Media	2.947.611.832	4 Media	2.947.611.832	4 Media	2.947.611.832	4 Media	2.947.611.832	4 Media	2.947.611.832	
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang Disusun	-	2 Dokumen	199.977.280	2 Dokumen	199.977.280	2 Dokumen	199.977.280	2 Dokumen	199.977.280	2 Dokumen	199.977.280	
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	-	1220 Konten	62.883.696	1220 Konten	62.883.696	1220 Konten	62.883.696	1220 Konten	62.883.696	1220 Konten	62.883.696	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik Yang Difasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan	-	29 orang	17.600.000	29 orang	17.600.000	29 orang	17.600.000	29 orang	17.600.000	29 orang	17.600.000	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.487.282.404		2.487.282.404		2.487.282.404		2.487.282.404		2.487.282.404	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	-	1,2		1,2		1,3		1,3		1,4		
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	3.500.000	100%	3.500.000	100%	3.500.000	100%	3.500.000	100%	3.500.000	
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	2.483.782.404	100%	2.483.782.404	100%	2.483.782.404	100%	2.483.782.404	100%	2.483.782.404	



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERANG

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Yang Sudah Ditempatkan Di Pusat Data Nasional	-	5 Aplikasi	175.268.800	5 Aplikasi	175.268.800	5 Aplikasi	175.268.800	5 Aplikasi	175.268.800	5 Aplikasi	175.268.800	
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat daerah di Pemerintah Kab/Kota Yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	1 Perangkat Daerah	253.046.000	1 Perangkat Daerah	253.046.000	1 Perangkat Daerah	253.046.000	1 Perangkat Daerah	253.046.000	1 Perangkat Daerah	253.046.000	
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah layanan Pemda Yang Memanfaatkan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah Terintegrasi, Yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-	1 Layanan	56.376.000	1 Layanan	56.376.000	1 Layanan	56.376.000	1 Layanan	56.376.000	1 Layanan	56.376.000	
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Audit TK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	-	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	
Koordinasi Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Khusus Yang di Bangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	-	2 Aplikasi	425.806.400	2 Aplikasi	425.806.400	2 Aplikasi	425.806.400	2 Aplikasi	425.806.400	2 Aplikasi	425.806.400	
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Operasional Pusat Kendali Daerah	-	1 Laporan	0	1 Laporan	00	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE Yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	-	5 Aplikasi	0	5 Aplikasi	0	5 Aplikasi	0	5 Aplikasi	0	5 Aplikasi	0	



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERANG

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	-	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	
Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD Yang Memanfaatkan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas	-	13 Perangkat Daerah	1.416.000.000	13 Perangkat Daerah	1.416.000.000	13 Perangkat Daerah	1.416.000.000	13 Perangkat Daerah	1.416.000.000	13 Perangkat Daerah	1.416.000.000	
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	-	1 Dokumen	155.775.000	1 Dokumen	155.775.000	1 Dokumen	155.775.000	1 Dokumen	155.775.000	1 Dokumen	155.775.000	
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	-	1 Dokumen	1.510.204	1 Dokumen	1.510.204	1 Dokumen	1.510.204	1 Dokumen	1.510.204	1 Dokumen	1.510.204	
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000	
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,55	2,65		2,69		2,72		2,74		2,75		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	37.000.000	100%	37.000.000	100%	37.000.000	100%	37.000.000	100%	37.000.000	



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERANG

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral Yang Sudah Mendapatkan Rekomendasi dari Pembina Data Statistik	-	96%	10.000.000	97%	10.000.000	98%	10.000.000	99%	10.000.000	99%	10.000.000	
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral Yang Telah Memenuhi Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan Kode Referensi dan/atau Data Indek	-	5%	5.000.000	15%	5.000.000	20%	5.000.000	25%	5.000.000	25%	5.000.000	
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral Yang Hasilnya Dapat Diakses Oleh Pengguna Data	-	95%	10.000.000	95%	10.000.000	95%	10.000.000	95%	10.000.000	95%	10.000.000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Pelatihan Di Bidang Statistik	29 Orang	29 Orang	12.000.000	29 Orang	12.000.000	29 Orang	12.000.000	29 Orang	12.000.000	58 Orang	12.000.000	
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				240.401.904		240.401.904		240.401.904		240.401.904		240.401.904	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	-	597		697		772		829		832		
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannnya Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90%	100%	190.401.904	100%	190.401.904	100%	190.401.904	100%	190.401.904	100%	190.401.904	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis	2 Laporan	2 Laporan	37.035.204	3 Laporan	37.035.204	3 Laporan	37.035.204	3 Laporan	37.035.204	3 Laporan	37.035.204	



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERANG

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Elektronik dan Non Elektronik													
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	-	2 Laporan	21.333.500	2 Laporan	21.333.500	2 Laporan	21.333.500	2 Laporan	21.333.500	2 Laporan	21.333.500		
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	29 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	35.473.200	58 Perangkat Daerah	35.473.200	58 Perangkat Daerah	35.473.200	58 Perangkat Daerah	35.473.200	58 Perangkat Daerah	35.473.200		
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Yang Ditetapkan Baik Berupa Peraturan Gubernur, Maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Yang Digunakan Sebagai Panduan Dalam Menjalankan Penyelenggaraan Persandian	-	2 Dokumen	96.560.000	2 Dokumen	96.560.000	2 Dokumen	96.560.000	2 Dokumen	96.560.000	3 Dokumen	96.560.000		
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000		
Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Berdasarkan Pemetaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	-	3 Kegiatan	50.000.000	3 Kegiatan	50.000.000	3 Kegiatan	50.000.000	3 Kegiatan	50.000.000	3 Kegiatan	50.000.000		



Hasil rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dalam Renstra DISKOMINFO Kabupaten Serang tahun 2025-2029 selanjutnya di fokuskan pada penetapan Program/Kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah yang diarahkan pada transformasi layanan publik berbasis digital yang terintegrasi, satu data statistik yg akurat serta pengelolaan keamanan Informasi yang handal, guna mendukung **“Terwujudnya Kabupaten Serang yang Bahagia”**, sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pengembangan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pelayanan Informasi Publik Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Penyusunan Konten Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERANG

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
			Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
			Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
			Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
			Penyediaan Akses Internet	
			Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
			Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
			Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
4.	PRORGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
			Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			berdasarkan Analisis Kebutuhan	
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Kinerja penyelenggaraan bidang Urusan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang di fokuskan pada transformasi layanan publik berbasis digital yang terintegrasi , satu data statistik yg akurat serta pengelolaan keamanan Informasi yang handal. Indikator Kinerja Utama (IKU) di gunakan untuk mengukur kinerja strategis DISKOMINFO dalam medukung sasaran pembangunan daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur kinerja operasional Program, Kegiatan dan Subkegiatan DISKOMINFO, berikut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 :

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (78,81)	BB (78,83)	BB (78,85)	BB (78,87)	A (80,01)	A (80,03)	
2.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,80	82,00	82,25	82,50	82,75	83,00	
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,75						
4.	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	Nilai		1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	
5.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	%	88,50	88,75	88,90	88,95	90,00	91,00	



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,60	2,65	2,69	2,72	2,74	2,75	
7.	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	497	597	697	772	829	832	

Dalam pencapaian indikator kinerja utama dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci, yang merupakan perhitungan atau perumusan dalam pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang. Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang :

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Komunikasi dan Informatika								
2.	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	%	71,50	73,20	75,01	77,30	78,30	85,70	
3.	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks	3,75						
4.	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	Nilai		1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	
5.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan	%	100	100	100	100	100	100	



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pemerintah daerah kabupaten/kota								
8	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	
9	Akses terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
	Statistik								
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,60	2,65	2,69	2,72	2,74	2,75	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data grid dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase OPD yang menggunakan data grid dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
	Persandian								
	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai	497	597	697	772	829	832	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2025 – 2029 merupakan penyesuaian atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta penjabaran dari Visi dan Misi DISKOMINFO yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang 2025-2029. Renstra DISKOMINFO Tahun 2025-2029 yang disusun berfungsi sebagai Pedoman, Penentu Arah, Sasaran dan Tujuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang dalam menyusun Renstra dan melaksanakan Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan, dan pelaksanaan Pelayanan kepada Stakeholder

Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 adalah dokumen dan bagian dari rangkaian kegiatan pembangunan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 merupakan acuan bagi seluruh jajaran Aparatur DISKOMINFO Kabupaten Serang dalam menjalankan Tugas dan Fungsi guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sehingga keberadaan DISKOMINFO sebagai Lembaga Perencana Pembangunan Daerah yang Profesional dapat terus ditingkatkan. Implementasi Renstra ini mensyaratkan pentingnya




sinkronisasi dan koordinasi lintas bidang dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian serta Pengawasan Pembangunan di Kabupaten Serang.

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan Kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi Renstra DISKOMINFO Kabupaten Serang 2025-2029 yang meliputi:

1. Setiap unsur dalam lingkup DISKOMINFO Kabupaten Serang berkewajiban untuk mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai Program dan Kegiatan dengan sebaik-baiknya;
2. Renstra DISKOMINFO Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja untuk 5 (lima) tahun mendatang dengan menjabarkan lebih lanjut Visi, Misi dan Agenda serta berbagai Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan secara Terukur, Terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan Rencana Tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain Program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Serang.

Demikian Renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang dan diketahui pula oleh stakeholder.

Serang, Desember 2025
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Statistik dan Persandian
Kabupaten Serang


Surtaman, S.STP., M.Si.
NIP. 19830730 200212 1 001